

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD KEMANTREN KOTAGEDE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**
 Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**
 Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.
- BAB V PENUTUP**
 Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Juni 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran Juni 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	11.719.697.877,00	5.784.159.667,00	49,35
Surplus (defisit)	(11.719.697.877,00)	(5.784.159.667,00)	49,35

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan Juni 2024

Uraian	2023	Juni 2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	
BELANJA	9.947.327.752,00	5.784.159.667,00	58,15
Surplus (defisit)	(9.947.327.752,00)	(5.784.159.667,00)	58,15

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari target sebesar Rp 0 naik 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran Juni 2024 sebesar Rp 5.784.159.667 atau 49.35 % dari target sebesar Rp 11.719.697.877 Persentase Realisasi Juni 2024 sebesar 58.15 % jika dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.947.327.752

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0%, Retribusi Daerah sebesar 0 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0 meningkat sebesar 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-		

Pajak Daerah	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
Pendapatan Daerah			

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	
	Pajak Daerah	-	-	
	Retribusi Daerah	-	-	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	
	Pendapatan Daerah			

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 94,92 %. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.438.288.712 Persentase Realisasi 2024 sebesar 463.64 % jika dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.947.327.752

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 5.08 %. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 536.451.900 atau sebesar 133.97 % dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 595.493.500 Naik sebesar 133.97% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 247.785.600 Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi 2024
1	Belanja Operasi	11.124.204.377,00	5.247.707.767,00	47,17	94,92
	Belanja Pegawai	5.031.775.000,00	2.438.288.712,00	48,46	
	Belanja Barang dan Jasa	3.986.961.315,00	1.799.923.005,00	45,15	
	Belanja Hibah	2.105.468.062,00	1.009.496.050,00	47,95	
	Belanja Bantuan Sosial				
2	Belanja Modal	595.493.500,00	536.451.900,00	90,09	5,08
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	390.909.500,00	390.167.900,00	99,81	
	Belanja Gedung dan Bangunan	204.584.000,00	146.284.000,00	71,50	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Belanja Modal Aset Lainnya				

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	920.000	460.000	50,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	299.000	299.000	100,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	299.000	299.000	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.196.000	598.000	50,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	299.000	299.000	100,00
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	299.000	-	-
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	1.518.000	759.000	50,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.202.000	11.122.000	99,29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.449.440	60.933.390	81,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.804.440	16.739.390	99,61
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.348.625	19.263.800	99,56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.970.000	20.367.500	56,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.070.000	33.730.000	39,65
Pengadaan Mebel	82.200.000	82.200.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.709.500	112.417.900	99,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	1.060.000	50,00
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	122.460.000	62.902.050	51,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.024.000	243.130.000	41,99
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.673.000	34.169.479	40,84
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.336.000	16.633.900	48,44
Pemeliharaan Mebel	4.870.000	4.370.000	89,73
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.452.000	6.419.000	56,05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.984.000	146.601.042	79,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.582.500	27.227.500	38,58
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	23.350.000	7.045.000	30,17
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.870.000	2.070.000	26,30
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	39.362.500	18.112.500	46,01
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.477.449.062	2.063.196.144	46,08
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	176.470.000	23.583.000	13,36
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.820.000	33.820.000	100,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.406.918.062	1.238.516.050	51,46
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.655.121.500	694.668.094	41,97
Evaluasi Kelurahan	4.991.000	2.737.000	54,84
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	38.245.000	14.925.000	39,02
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	69.031.500	27.439.500	39,75
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	22.212.000	-	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	57.890.000	18.800.000	32,48
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	12.750.000	8.707.500	68,29
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	319.677.750	138.964.250	43,47

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	319.677.750	138.964.250	43,47
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.710.000	18.270.000	38,29
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	24.880.000	8.700.000	34,97
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.830.000	9.570.000	41,92
JUMLAH	11.719.697.877	5.784.159.667	49,35

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Program Kegiatan Sub Kegiatan			
Jumlah Belanja				

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi Juni 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Rincian Objek	0	0

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan per Rincian Objek pendapatan, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.2	Belanja	Realisasi Juni 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Operasi	5.247.707.767,00	9.699.542.152,00
	Belanja Modal	536.451.900,00	247.785.600,00
	total	5.784.159.667,00	9.947.327.752,00

Penjelasan :

Uraikan realisasi belanja per Rincian Objek belanja, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa dapat tercapai atau mengapa tidak tercapai.

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan- LO Per Juni 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per Desember 2023 (Rp)
	Rincian Objek ...	0	0

Penjelasan :

Uraikan realisasi pendapatan LO per Rincian Objek pendapatan LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.4	Beban	Jumlah Pendapatan- LO Per Juni 2024 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per Desember 2023 (Rp)
	Beban Operasi	4.469.965.449,00	9.049.488.881,06

Penjelasan realisasi :

Uraikan realisasi beban LO per Rincian Objek beban LO, Jelaskan masing-masing apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

3.5	Aset	Juni 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
	Aset Lancar	2.397.611.566,00	1.436.075.900,00
	Aset Tetap	10.506.277.962,74	7.639.388.962,61
	Aset Lainnya	0,00	0,00
		12.903.889.528,74	9.075.464.862,61

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Aset, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Aset selama tahun berjalan.

3.6	Kewajiban	Juni 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
	Belanja Jasa		
	Tenaga	17.094.000,00	
	Kebersihan		
	Belanja Telepon	321.614,00	0,00
	Belanja Air	559.700,00	0,00
	Belanja Listrik	8.758.472,00	0,00
	Belanja Hibah	2.260.000,00	
		28.993.786,00	0,00

Penjelasan :

Uraikan per Rincian Objek Kewajiban, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Kewajiban

3.7	Ekuitas	Juni 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
	1 Ekuitas awal	9.066.008.424,61	8.274.235.206,02
	2 RK PPKD	5.948.415.667,00	9.947.327.752,00
	3 Ekuitas Mutasi Aset Tetap	2.355.354.632,15	-47.596.563,77
	4 Ekuitas Mutasi Aset Lainnya		0,00
	5 Akumulasi Penyusutan Dampak Kumulatif Perubahan	(24.917.532,02)	-58.469.088,58
	6 Kebijakan Kesalahan Mendasar		
	7 Ekuitas Akhir	12.874.895.742,74	9.066.008.424,61

Penjelasan :

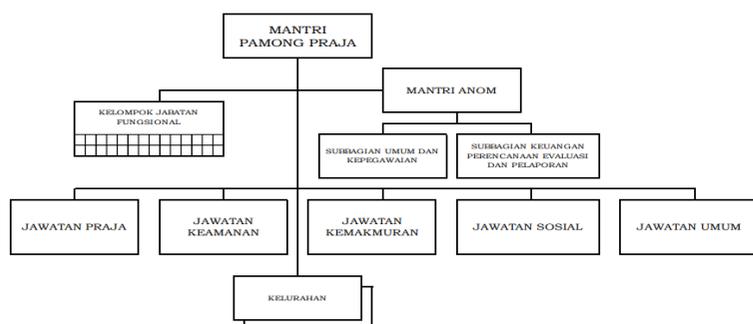
Uraikan per Rincian Objek Ekuitas, beri penjelasan penambahan dan pengurangan Ekuitas selama tahun berjalan. Penambahan Aset BM dan Hibah PC

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA KEMANTREN DAN
KELURAHAN.

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN



 Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Mantri Pamong Praja

Tugas: mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Fungsi:

- 1 Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum,
- 2 pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren
- 3 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- 4 penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- 5 penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren
- 6 penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- 7 penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren
- 8 penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- 9 penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren
- 10 pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat
- 11 pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan
- 12 pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- 13 pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- 14 pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- 15 pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- 16 pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- 17 pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- 18 pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 19 pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren dan
- 20 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren

Bab V Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
- 5.1.1 Pendapatan**
- 5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah**
- Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran Juni 2024 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 % dari target Rp 0 yang terdiri dari :
- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0 atau 0 % dari target;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0 atau 0 % dari target;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0 atau 0 % dari target;
 - 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0 atau 0 % dari target.
- 5.1.2 Belanja**
- Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran Juni 2023 sebesar Rp5.784.159.667 atau 49,35% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
- 5.1.2.a. Belanja Operasi**
- Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp5.247.707.767 atau sebesar 94,92% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp5.031.775.000 terealisasi sebesar Rp2.438.288.712 atau 48,46% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp3.986.961.315 terealisasi sebesar Rp1.799.923.005 atau sebesar 45,15% dari anggaran.
- Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp2.105.468.062 terealisasi Rp1.009.496.050 atau 47,95% dari Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 0 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran.
- 5.1.2.b. Belanja Modal**
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp536.451.900 atau 90,09% dari anggaran.
- Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.
- 5.2 Neraca**
- 5.2.1 Aset**
- Neraca per Juni 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp12.903.889.528,74 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.397.611.566 Aset Tetap sebesar Rp10.506.277.962,74 dan Aset Lainnya sebesar Rp -
- 5.2.2 Kewajiban**
- Neraca per Juni 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 28.993.786, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.
- 5.2.3 Ekuitas**
- Neraca per Juni 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp12.874.895.742,74
- 5.3 Laporan Operasional**
- 5.3.1 Pendapatan-LO**
- Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp 0 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0.
- 5.3.2 Beban-LO**
- Jumlah Beban-LO tahun Juni 2024 sebesar Rp4.469.965.449 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp4.469.965.449, dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0
- 5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**
- Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp (4.469.965.449)
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas**
- 5.4.1 Ekuitas Awal**
- Ekuitas awal sebesar Rp9.066.008.424,61 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.
- 5.4.2 Surplus/Defisit LO**
- Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (4.469.965.449) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi Aset Tetap sebesar Rp2.355.354.632,15 dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(24.917.532,02)

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp12.874.895.742,74 merupakan ekuitas akhir tahun 2024.

Mantri Pamong Praja

Komaru Ma'arif, S.I.P.,M.Si
NIP. 197205181992031003